

**OPTIMALISASI KEGIATAN REKAPITULASI DATA LEMBAGA
KEMASYARAKATAN DESA DAN SOSIALISASI PENCEGAHAN STUNTING
DI KECAMATAN TAMAN**

Windy Eka Adelia¹, Hasan Ismail²

^{1,2}Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

windyekaadelia33@gmail.com , hasanismail@untag-sby.ac.id

ABSTRAK

Kegiatan pendampingan di instansi pemerintah memberikan pengalaman praktis bagi mahasiswa dalam memahami penerapan kebijakan publik di tingkat daerah. Artikel ini membahas hasil kegiatan pendampingan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sidoarjo, yang berfokus pada implementasi kegiatan rekapitulasi data lembaga kemasyarakatan desa (LKD) serta keterlibatan dalam sosialisasi pencegahan stunting di Kecamatan Taman. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan partisipatif melalui observasi langsung, wawancara, dan analisis dokumen. Hasil menunjukkan bahwa kegiatan rekapitulasi masih menghadapi kendala dalam digitalisasi dan validitas pelaporan antar desa, namun kolaborasi antara DPMD, lembaga desa, dan Dinas Kesehatan dalam sosialisasi stunting terbukti efektif meningkatkan kesadaran masyarakat. Kegiatan pendampingan ini memberikan wawasan nyata tentang pentingnya pelayanan publik berbasis data serta sinergi lintas sektor dalam menanggulangi masalah gizi masyarakat.

Kata Kunci: Pendampingan, Rekapitulasi data, Lembaga kemasyarakatan desa, DPMD, Stunting

ABSTRACT

Internships in government institutions provide students with practical experience in understanding the implementation of public policies at the regional level. This article discusses the results of an internship conducted at the Department of Community and Village Empowerment (DPMD) of Sidoarjo Regency, focusing on the implementation of data recapitalization activities for village community institutions (Lembaga Kemasyarakatan Desa or LKD) and participation in stunting prevention campaigns in Taman District. The research method used is descriptive qualitative with a participatory approach through direct observation, interviews, and document analysis. The findings show that the data recapitalization process still faces challenges in digitalization and the validity of inter-village reporting; however, collaboration among the DPMD, village institutions, and the Health Office in stunting prevention has proven effective in increasing community awareness. This internship activity provides real insight into the importance of data-based public service delivery and cross-sectoral synergy in addressing community nutrition issues.

Keywords: Internship, Data recapitalization, Village community institutions, DPMD, Stunting

PENDAHULUAN

Permasalahan tata kelola pemerintahan dan pembangunan masyarakat saat ini menjadi perhatian global, terutama dalam konteks good governance dan pelayanan publik berbasis data. Organisasi internasional seperti UNDP menekankan pentingnya penguatan kelembagaan masyarakat lokal untuk mencapai pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*), khususnya pada tujuan ke-2 (Tanpa Kelaparan) dan ke-16 (Institusi yang Kuat). Pendekatan partisipatif dalam pengelolaan data pembangunan juga diakui sebagai instrumen penting untuk meningkatkan transparansi dan efektivitas program publik di berbagai negara berkembang.

Secara nasional, pemerintah Indonesia telah menerapkan kebijakan yang menekankan pada digitalisasi administrasi publik dan pemberdayaan masyarakat desa melalui (UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 6 TAHUN 2014, 2014). Kebijakan ini mendorong setiap daerah untuk membangun sistem data desa yang akurat dan terintegrasi guna mendukung perencanaan pembangunan serta penyaluran program pemerintah (Kemendagri, 2022). Dalam konteks pelayanan publik, data administrasi desa memiliki peran penting dalam mengukur kinerja lembaga kemasyarakatan seperti PKK, Karang Taruna, LPM, BPD, dan Posyandu yang menjadi garda terdepan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan kesehatan publik (Dwiyanto, 2008).

Di tingkat daerah, Kabupaten Sidoarjo merupakan wilayah dengan tingkat urbanisasi dan kepadatan penduduk yang tinggi di Provinsi Jawa Timur. Kondisi ini menimbulkan tantangan tersendiri dalam pengelolaan administrasi pemerintahan desa dan koordinasi antar lembaga kemasyarakatan. Dalam hal ini, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sidoarjo memiliki tanggung jawab penting dalam melaksanakan rekapitulasi data lembaga kemasyarakatan desa (LKD) (Chotimah et al., 2019). Kegiatan rekapitulasi dilakukan untuk memastikan setiap lembaga desa berfungsi aktif, memiliki administrasi yang tertata, dan terlibat dalam kegiatan pembangunan masyarakat (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa & Kabupaten Sidoarjo, 2024).

Kegiatan rekapitulasi yang dilaksanakan selama pendampingan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo mencakup berbagai bentuk aktivitas administratif dan pembinaan kelembagaan desa. Kegiatan tersebut meliputi rekapitulasi pekerjaan RT dan RW yang bertujuan untuk memetakan struktur kepengurusan, masa jabatan, serta aktivitas kemasyarakatan di tingkat lingkungan; rekapitulasi pemenang lomba desa sebagai bagian dari upaya evaluasi kinerja dan pemberian apresiasi terhadap lembaga desa yang berprestasi, serta rekapitulasi surat keputusan (SK) undangan dan kegiatan dinas untuk menjaga konsistensi administrasi dan dokumentasi berbagai kegiatan pemerintahan desa. Selain itu, penulis juga berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi pencegahan stunting di Kecamatan Taman, yang dilaksanakan melalui kerja sama antara DPMD, Dinas Kesehatan, PKK, dan Posyandu sebagai bentuk sinergi lintas sektor dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat desa (Dinas Kesehatan Sidoarjo, 2024).

Masalah stunting menjadi isu penting secara nasional karena berdampak pada kualitas sumber daya manusia dan produktivitas bangsa. Pemerintah Indonesia menargetkan penurunan prevalensi stunting menjadi di bawah 14% pada tahun 2024 melalui strategi konvergensi lintas sektor (Bappenas, 2021). Di Kabupaten Sidoarjo, program sosialisasi pencegahan stunting telah menunjukkan hasil positif, namun efektivitasnya masih sangat bergantung pada validitas data lembaga desa yang menjadi pelaksana kegiatan di lapangan. Oleh karena itu, kegiatan rekapitulasi data lembaga kemasyarakatan desa menjadi dasar penting dalam memastikan sasaran program pencegahan stunting dapat tercapai secara efektif (Lisnawati et al., 2023).

Kegiatan pendampingan yang dilaksanakan oleh penulis di DPMD Kabupaten Sidoarjo pada 14 Juli–29 Agustus 2025 merupakan bagian dari proses pembelajaran terapan yang bertujuan memperkuat pemahaman tentang pengelolaan data kelembagaan desa dan praktik pelayanan publik berbasis bukti (*evidence-based policy*). Melalui kegiatan ini, penulis tidak hanya berperan sebagai pengamat tetapi juga sebagai pelaksana yang berpartisipasi langsung dalam kegiatan rekapitulasi data serta sosialisasi pencegahan stunting di Kecamatan Taman.

Kegiatan ini sejalan dengan teori New Public Management (Hughes, 2018), yang menekankan efisiensi dan akuntabilitas dalam manajemen sektor publik, serta Collaborative Governance (Rhodes, 1996), yang menyoroti pentingnya kerja sama antaraktor pemerintah, lembaga masyarakat, dan sektor kesehatan dalam mencapai tujuan pembangunan bersama. Dengan demikian, kegiatan pendampingan ini tidak hanya memiliki nilai akademik tetapi juga memberikan kontribusi praktis terhadap peningkatan tata kelola pemerintahan desa berbasis data dan penguatan kolaborasi lintas sektor dalam pencegahan stunting di Kabupaten Sidoarjo.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pendampingan yang dilaksanakan oleh penulis di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sidoarjo berlangsung mulai tanggal 14 Juli 2025 hingga 29 Agustus 2025. Program ini memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk menerapkan ilmu dan teori yang diperoleh selama perkuliahan dalam praktik nyata penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui kegiatan ini, penulis tidak hanya mempelajari proses administrasi publik di tingkat kabupaten, tetapi juga memperoleh pengalaman langsung dalam pengelolaan administrasi pemerintahan desa yang relevan dengan bidang Administrasi Publik dan Pemberdayaan Masyarakat.

Sebagai bagian dari program pendampingan, penulis ditempatkan di Bidang Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Masyarakat, yang memiliki tanggung jawab utama dalam pembinaan, pengawasan, dan pengelolaan administrasi pemerintahan desa di seluruh wilayah Kabupaten Sidoarjo. Pelaksanaan kegiatan pendampingan dilakukan melalui empat tahapan utama sebagai berikut:

1. Tahap Observasi dan Adaptasi

Tahap ini bertujuan untuk memahami lingkungan kerja, struktur organisasi, serta mekanisme pelayanan administrasi pemerintahan desa di lingkungan DPMD Kabupaten Sidoarjo. Penulis melakukan orientasi terhadap tugas-tugas bidang kelembagaan masyarakat dan administrasi pemerintahan desa, termasuk mengenal proses kerja dalam rekapitulasi data lembaga kemasyarakatan desa (LKD), kegiatan RT/RW, serta program sosialisasi stunting di tingkat kecamatan, khususnya Kecamatan Taman. Melalui tahapan ini, penulis memperoleh gambaran umum tentang pola kerja birokrasi, prosedur pelaporan, serta koordinasi antara dinas, kecamatan, dan desa.

2. Tahap Pelaksanaan Kegiatan Operasional

Pada tahap ini, penulis berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan administrasi dan rekapitulasi data yang menjadi bagian dari fungsi utama DPMD. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan antara lain:

- Melakukan rekap pekerjaan RT/RW yang mencakup data nama ketua RT dan RW, serta jumlah warga binaan.
- Menyusun rekapitulasi pemenang lomba desa dan kelurahan yang diadakan oleh DPMD, termasuk penilaian prestasi kelembagaan masyarakat dan inovasi desa.

- Membantu rekapitulasi SK undangan kegiatan dinas, seperti rapat koordinasi, pelatihan, dan kegiatan pembinaan desa.
- Berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi pencegahan stunting di Kecamatan Taman, bekerja sama dengan PKK, Dinas Kesehatan, dan pemerintah desa.

Melalui keterlibatan langsung dalam berbagai kegiatan tersebut, penulis memperoleh pemahaman empiris mengenai proses administrasi pemerintahan desa, mekanisme rekapitulasi data, dan sistem pelaporan lintas bidang di lingkungan DPMD Kabupaten Sidoarjo.

3. Tahap Studi Dokumen dan Wawancara Informal

Penulis melakukan penelaahan terhadap dokumen dan arsip dinas seperti laporan rekapitulasi lembaga kemasyarakatan, SK pemenang lomba desa, dan dokumen kegiatan stunting. Selain itu, dilakukan pula wawancara informal dengan pegawai bidang administrasi dan kelembagaan masyarakat untuk menggali informasi tentang kendala, solusi, dan praktik baik dalam pengelolaan administrasi pemerintahan desa.

Kegiatan studi dokumen dan wawancara ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang tata kelola pemerintahan desa, sistem pembinaan kelembagaan masyarakat, serta hubungan antar sektor pemerintahan di tingkat kabupaten.

4. Tahap Evaluasi dan Penyusunan Laporan Kegiatan

Tahap akhir dari kegiatan pendampingan adalah penyusunan laporan hasil kegiatan dan refleksi pembelajaran. Penulis mendokumentasikan seluruh aktivitas pendampingan, menganalisis hasil temuan lapangan, dan mengaitkannya dengan teori-teori administrasi publik seperti teori pelayanan publik (Dwiyanto, 2008), New Public Management (Hughes, 2003), dan Collaborative Governance (Rhodes, 1996).

Kegiatan evaluasi ini menghasilkan kesimpulan bahwa rekapitulasi data lembaga kemasyarakatan desa merupakan bentuk nyata implementasi pelayanan publik berbasis data, yang mendukung transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah. Pendekatan deskriptif kualitatif partisipatoris digunakan dalam pelaksanaan pendampingan ini, di mana mahasiswa berperan tidak hanya sebagai pengamat, tetapi juga sebagai pelaksana yang ikut berkontribusi dalam mendukung efektivitas administrasi pemerintahan di DPMD Kabupaten Sidoarjo.

HASIL dan PEMBAHASAN

Hasil

Kegiatan pendampingan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sidoarjo berfokus pada berbagai aktivitas rekapitulasi data yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan desa dan pembinaan kelembagaan masyarakat. Mitra kegiatan, yaitu DPMD, memiliki karakteristik sebagai lembaga pemerintah daerah yang berperan dalam membina pemerintahan desa serta memperkuat partisipasi masyarakat. Melalui kegiatan pendampingan, mahasiswa berkontribusi dalam beberapa kegiatan rekapitulasi yang bersifat administratif dan strategis. Beberapa kegiatan rekapitulasi yang dilakukan meliputi:

1. Rekapitulasi Pekerjaan RT dan RW, yang mencakup data nama ketua RT dan RW, serta jumlah warga binaan.
2. Rekapitulasi Pemenang Lomba Desa, yaitu penyusunan daftar dan data hasil penilaian lomba desa berprestasi serta inovasi desa
3. Rekapitulasi SK Undangan dan Administrasi Kegiatan, berupa pengelolaan dan pendataan surat keputusan, undangan kegiatan dinas, serta arsip dokumentasi kegiatan lintas bidang.

4. Partisipasi dalam Kegiatan Sosialisasi Pencegahan Stunting di Kecamatan Taman, yang dilakukan melalui kerja sama dengan PKK, Dinas Kesehatan, dan pemerintah desa.



Gambar 1 : Rekapitulasi Pekerjaan RT dan RW



Gambar 2 : Rekapitulasi Pemenang Lomba Desa



Gambar 3 Rekapitulasi SK Undangan



Gambar 4 Sosialisasi Pencegahan Stunting

Kegiatan rekapitulasi tersebut memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi administrasi kelembagaan desa di Kabupaten Sidoarjo. Hasil pengumpulan dan verifikasi data menunjukkan adanya variasi tingkat keaktifan lembaga kemasyarakatan, perbedaan format pelaporan antar desa, serta kebutuhan akan sistem rekapitulasi yang lebih terintegrasi. Di sisi lain, kegiatan sosialisasi stunting memperlihatkan sinergi positif antara DPMD dan masyarakat, khususnya dalam memanfaatkan data kelembagaan sebagai dasar pelaksanaan program kesehatan masyarakat.

PEMBAHASAN

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa proses rekapitulasi data di DPMD Kabupaten Sidoarjo memainkan peran penting dalam membangun pelayanan publik berbasis data. Melalui pendataan RT/RW, pemenang lomba desa, dan SK kegiatan, DPMD dapat mengelola informasi pemerintahan desa secara lebih sistematis dan akuntabel. Data yang terhimpun menjadi dasar perencanaan kegiatan pembinaan desa serta bahan evaluasi kinerja lembaga masyarakat. Secara teoritis, kegiatan rekapitulasi tersebut mendukung penerapan prinsip pelayanan publik yang responsif dan akuntabel sebagaimana dikemukakan oleh Dwiyanto (2008). Keakuratan data dan transparansi proses administrasi mencerminkan tanggung jawab instansi publik dalam menyediakan informasi yang dapat diakses dan dimanfaatkan oleh berbagai pihak.

Dari perspektif New Public Management (Hughes, 2003), digitalisasi proses rekapitulasi diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan kecepatan pelayanan. Tantangan yang dihadapi selama kegiatan pendampingan—seperti perbedaan format pelaporan antar desa dan keterbatasan sumber daya operator—menunjukkan perlunya sistem digital yang terstandar agar seluruh data dapat terintegrasi secara real-time di tingkat kabupaten. Selain itu, kegiatan sosialisasi pencegahan stunting di Kecamatan Taman memperlihatkan praktik nyata dari Collaborative Governance (Rhodes, 1996). Kolaborasi antara DPMD, Dinas Kesehatan, PKK, dan Posyandu membuktikan bahwa pengelolaan data kelembagaan desa dapat menjadi landasan bagi pelaksanaan program lintas sektor. Keterlibatan lembaga masyarakat dalam kegiatan sosialisasi juga memperkuat peran desa sebagai garda terdepan dalam pelaksanaan kebijakan publik.

Jika dibandingkan dengan kegiatan pengabdian masyarakat di wilayah lain, hasil ini sejalan dengan temuan penelitian di beberapa kabupaten di Jawa Timur yang menunjukkan bahwa digitalisasi data kelembagaan mempercepat proses pengambilan keputusan dan meningkatkan koordinasi antar instansi. Namun, keberhasilan implementasi tetap bergantung pada kualitas sumber daya manusia dan dukungan infrastruktur teknologi di tingkat desa. Secara keseluruhan, kegiatan pendampingan dan rekapitulasi data yang dilakukan di DPMD Kabupaten Sidoarjo memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kapasitas administrasi pemerintahan desa. Proses rekapitulasi yang terkelola dengan baik tidak hanya menjadi alat administrasi, tetapi juga instrumen strategis dalam memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pelayanan publik di tingkat daerah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan pendampingan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sidoarjo memberikan pengalaman nyata bagi mahasiswa dalam memahami pentingnya rekapitulasi data lembaga kemasyarakatan desa (LKD) sebagai dasar penyelenggaraan pelayanan publik berbasis data. Proses rekapitulasi ini memiliki peran strategis dalam mendukung efektivitas program pemberdayaan masyarakat dan sosialisasi pencegahan stunting, terutama di Kecamatan Taman yang menjadi contoh implementasi kolaborasi lintas sektor antara DPMD, Dinas Kesehatan, PKK, dan Posyandu. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sistem rekapitulasi data yang terkelola dengan baik mampu meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kualitas informasi yang digunakan dalam perencanaan kebijakan publik. Namun, masih terdapat beberapa tantangan seperti keterbatasan digitalisasi data dan kapasitas sumber daya manusia di tingkat desa.

Oleh karena itu, penguatan sistem rekapitulasi berbasis digital, peningkatan pelatihan operator data desa, serta integrasi data antar sektor menjadi langkah penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang efektif dan berkelanjutan. Selain itu, sinergi antara lembaga kemasyarakatan desa dan instansi pemerintah perlu terus diperkuat agar kegiatan sosialisasi

pencegahan stunting dapat lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. Secara keseluruhan, kegiatan pendampingan ini tidak hanya memperkaya pengetahuan dan keterampilan mahasiswa dalam bidang administrasi publik, tetapi juga memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan kapasitas administrasi dan pelayanan publik di lingkungan DPMD Kabupaten Sidoarjo.

DAFTAR PUSTAKA

- Chotimah, C., Widodo, R., & Handayani, T. (2019). EFEKTIVITAS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA BULULAWANG. *Jurnal Civic Hukum*, 4(2). <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/jurnalcivichukum>
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, & Kabupaten Sidoarjo. (2024). *Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa - Kabupaten Sidoarjo*. DINPMD. <https://dinpmd.sidoarjokab.go.id/index-1.php>
- Dwiyanto, A. (2008). *MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE MELALUI PELAYANAN PUBLIK* (3rd ed.). Gadjah Mada University Press.
- Hughes, O. E. (2018). *Public Management & Administration* (5th ed.). RED GLOBE PRESS.
- Lisnawati, L., Shaffya Humairaa, A., Andriani, A., Jihan, S., Salsabila, S., Rohmah, S. U., Aisah, S., Mukaromah, S., Herawan, T., & Zahira, T. (2023). *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat STRATEGI PENCEGAHAN STUNTING DI DESA CIHERANG KABUPATEN CIANJUR MELALUI PENGABDIAN MASYARAKAT*. <https://ejournal.umbandung>
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 6 TAHUN 2014, BPK RI (2014).